**RENCANA KERJA**

**(RENJA)**

**KANTOR KECAMATAN MALILI**

**TAHUN 2022**

**KATA PENGANTAR**

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena berkat karunia-Nya, tim penyusun Rencana Kerja Kecamatan Malili Pemerintah Kabupaten Luwu Timur telah dapat menyelesaikan ***“RENCANA KERJA KECAMATAN MALILI TAHUN 2022”.***

Rencana kerja ini secara garis besar mengupas tentang visi misi, nilai, tujuan strategis, sasaran dan target strategis Kecamatan Malili. Selain itu, juga dibahas tentang bagaimana cara mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui program dan kegiatan indikatif yang terhubung langsung dengan tujuan strategis yang ingin dicapai.

Dengan segala keterbatasan perumusan dokumen Renja ini tidak akan mungkin selesai tanpa bantuan dari berbagai pihak dan lembaga yang tidak dapat kami sebutkan satu per satu di sini.

Kami menyadari Rencana Kerja ini masih banyak kekurangannya, namun demikian kami berharap semua kebijakan, program dan kegiatan yang kami susun dapat mengarahkan semua kegiatan pembangunan yang dilakukan oleh semua elemen baik aparatur pemerintah maupun masyarakat dapat mengarah kepada pencapaian tujuan dan sasaran yang telah disepakati. Rencana Kerja ini juga diharapkan dapat dijadikan pedoman bagi Kecamatan Malili maupun bagi pihak lain yang memerlukannya.

 Malili, 2021

 CAMAT,

 **NUR SYAIFULLAH RAHMAN.S.STP**

 Pangkat : Pembina

 NIP : 198511262004121001

# DAFTAR ISI

 Halaman

Kata Pengantar ......................................................................................

Daftar Isi .............................................................................................

[BAB I PENDAHULUAN 1](#_TOC_250005)

* 1. [Latar Belakang 1](#_TOC_250004)
	2. [Landasan Hukum](#_TOC_250003) 3
	3. [Maksud dan Tujuan](#_TOC_250002) 6
	4. [Sistematika Penulisan](#_TOC_250001) 7

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

* 1. Evaluasi Pelaksanaan Renja dan Capaian Renstra

Kantor Kecamatan Malili 10

* 1. [Analisis Kinerja Pelayanan Kantor Kecamatan Malili](#_TOC_250000) 23
	2. Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kantor Kecamatan Malili 25

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD ...................... | 27 |
| 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat... | 37 |
| BAB III | TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN.................. | 38 |
|  | 3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional ………….……… | 38 |
|  | 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Kantor Kecamatan Malili ... | 38 |
|  | 3.3 Program dan Kegiatan ...................................................... | 41 |
| BAB IV | RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH | 50 |
| BAB V | PENUTUP ................................................................................. | 55 |

# BAB I

#  PENDAHULUAN

# Latar Belakang

#  Rencana Kerja (Renja) SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode satu (1) tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Renja disusun sesuai usulan program dan kegiatan yang didukung dengan data atau informasi yang memadai dan akurat dari sumber yang dapat dipertanggungjawabkan. Data atau informasi dikumpulkan sedemikian rupa hingga memperlihatkan secara jelas capaian kinerja penyelenggaraan urusan wajib/pilihan pemerintahan daerah yang menjadi tanggungjawab sesuai dengan tugas fungsi SKPD.

Rencana Kerja Kecamatan Malili tahun 2022, merupakan Rencana Pembangunan Tahunan yang pada dasarnya disusun untuk mewujudkan visi pembangunan Kabupaten Luwu Timur yaitu “ Luwu Timur yang Berkelanjutan dan Lebih Maju Berlandaskan Nilai Agama dan Budaya”. Dalam proses pencapaian visi tersebut, penyusunan Renja SKPD berdasarkan 6 Misi Pembanguan Kabupaten Luwu Timur yaitu :

1. Maningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat secara menyeluruh;
2. Mengembangkan ekoonomi daerah yang berdaya saing dan berjaringan luas;
3. Menyediakan infrastruktur daerah yang memadai dan lingkungan yang berkualitas;
4. Menciptakan kepemerintahan dan layanan publik yang lebih baik;
5. Mewujudkan ketentraman dan ketertiban bagi seluruh warga masyarakat;
6. Menjamin keberlangsungan pembangunan yang berbasis pada agama dan budaya.

Untuk mendukung pencapaian visi dan misi tersebut, Kecamatan Malili mempunyai tugas pokok membantu bupati dalam menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kehidupan kemasyarakatan serta melaksanakan sebagian kewenangan bupati berdasarkan pelimpahan kewenangan.

 Penyusunan rancangan Renja SKPD merupakan tahapan awal yang harus dilakukan sebelum disempurnakan menjadi dokumen Renja SKPD yang definitif. Dalam prosesnya, penyusunan rancangan Renja SKPD mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD. Oleh karena itu penyusunan rancangan Renja SKPD dapat dikerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan rancangan awal RKPD, dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting SKPD, evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra SKPD.

 Penetapan dokumen RENJA SKPD harus mengikuti tata cara dan alur penyusunannya, sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah antara lain :

1. Program dalam Renja harus sesuai dengan program prioritas sebagaimana tercantum dalam misi RPJMD pada tahun berkenaan;
2. Program dan kegiatan dalam Renja SKPD harus selaras dengan program dan kegiatan yang disepakati oleh seluruh pemangku kepentingan ;
3. Program dan kegiatan dalam Renja, dilengkapi dengan indikator kinerja hasil (outcome) indikator kinerja keluaran (output) dan dilengkapi dengan pendanaan yang menunjukan prakiraan maju.

Sebagai Dokumen Rencana tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, Renja Kantor Kecamatan Malili mempunyai arti yang strategis dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan pemerintah daerah mengingat beberapa hal sebagai berikut :

1. Renja merupakan acuan SKPD untuk memasukan program kegiatan kedalam KUA-PPAS dan perencanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) tahun 2022.
2. Renja SKPD merupakan salah satu instrumen untuk evaluasi pelaksanaan program /kegiatan Instansi untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang tercantum dalam Rencana Kinerja Tahunan sebagai wujud dari kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah pada Tahun 2022.

Renja Kantor Kecamatan Malili Tahun 2022 merupakan pedoman dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kantor Kecamatan Malili. Dalam rangka upaya mencapai sasaran yang telah diamanatkan di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021-2026, tentunya diperlukan perencanaan-perencanaan yang matang, terpadu dan terintegrasi agar proses pencapaian sasaran yang telah ditentukan dapat berjalan secara efektif, efesien, berdaya guna dan berhasil guna..

* 1. **Landasan Hukum**

Adapun Landasan hukum Kantor Kecamatan Malili dalam penyusunan Rencana Kerja Tahun 2021 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang
Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 301) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 ten tang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 314);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 2 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP) Kabupaten Luwu Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2005 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 3 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 2 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP) Kabupaten Luwu Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 100);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 103) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2020 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 124);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 11 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021 Nomor 11);
15. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Luwu Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016 Nomor 08. Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 103)
16. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 48 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021 – 2026 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021 Nomor 48);
17. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 25 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2022.
	1. **Maksud dan Tujuan**
		1. **Maksud**

Penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Malili Tahun 2022 dimaksudkan untuk menjadi pedoman dan acuan Kecamatan Malili dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Rencana Kerja Kecamatan Malili Tahun 2022 merupakan dokumen perencanaan yang memuat program dan kegiatan pembangunan daerah yang menjadi tolak ukur penilaian kinerja Kecamatan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama Tahun 2022. Selain itu penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Malili Tahun 2022 dimaksudkan adalah :

1. Menjabarkan program dan kegiatan Renstra Kantor Kecamatan Malili kedalam program/kegiatan tahunan.
2. Menjadi acuan bagi Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
3. Memberikan arah dan pedoman bagi seluruh aparatur Kantor Kecamatan Malili Kabupaten Luwu Timur dalam melaksanakan tugasnya sehingga tujuan program dan sasaran kegiatan yang telah ditetapkan dalam kurun waktu tahun 2022 dapat tercapai.
4. Memberikan informasi kepada pemangku kepentingan (*stakeholders*) tentang rencana Kecamatan Malili Tahun 2022.
5. Mempermudah pengendalian, monitoring, evaluasi dan koordinasi pelaksanaan rencana kegiatan dalam kurun waktu tahun 2022.
6. Memberikan pedoman dalam rangka pelaksaan tugas pokok dan fungsi Kantor Kecamatan Malili.
	* 1. **Tujuan**

Tujuan dari penyusunan Rencana Kerja Tahun 2022 adalah :

1. Agar terbangun konsistensi perencanaan tahunan dengan perencanaan lima tahunan Kantor Kecamatan Malili;
2. Menetapkan program dan kegiatan Kecamatan Malili;
3. Memberikan pedoman dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran (RKA) Kecamatan Malili 2022;
4. Memberikan acuan dalam pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana program dan kegiatan Kecamatan Malili Tahun 2022;
5. Mewujudkan pertanggungjawaban dalam mencapai visi dan misi Kabupaten Luwu Timur;
6. Sebagai pelaksanaan program dan kegiatan yang ada di Kecamatan Malili Tahun 2022;
7. Sebagai penyusunan kebijakan anggaran, program dan kegiatan Tahun 2022.

# Sistematika Penulisan

Sistematika Rancangan Rencana Kerja Kantor Kecamatan Malili Tahun 2022 sebagai berikut :

##  **BAB I PENDAHULUAN**

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja Kerja Kantor Kecamatan Malili meliputi latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan dan sistimatika penulisan Renja.

## **BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU**

Bab ini menguraikan tentang kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan renja perangkat daerah lalu ( tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan ( tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan renja perangkat daerah sudah disahkan.

Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra perangkat daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan renja perangkat daerah tahun-tahun sebelumnya. Review hasil evaluasi pelaksanaan renja perangkat daerah tahun lalu, dan realisasi rentra tahunan perangkat daerah mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan perangkat daerah dan/ atau realisasi APBD untuk perangkat daerah yang bersangkutan

## **BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH**

Bab ini menguraikan tentang telaahan terhadap kebijakan nasional, tujuan dan sasaran renja perangkat daerah serta program dan kegiatan.

## **BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

Bab ini menguraikan rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah pada tahun rencana.

## **BAB V PENUTUP**

Memuat catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah-kaidah pelaksanaan serta rencana tindak lanjut.

# BAB II

**HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH**

**TAHUN LALU**

Pelaksanaan evaluasi sebagai sebagai salah satu fungsi peningkatan kualitas kinerja instansi pemerintah, dilaksanakan guna mengetahui program/kegiatan yang tidak memenuhi target, telah memenuhi target ataupun melebihi target kinerja yang direncanakan, sehingga atas dasar evaluasi pelaksanaan tersebut dapat diketahui faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan, implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah dan kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Tercapai tidaknyaa pelaksanaan program dan kegiatan yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan laopran kinerja dan laporan keuangan. Laporan kinerja adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan APBD. Kinerja sendiri merupakan keluaran/hasil dari kegiatan/program yang hendak atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur

Pengukuran laporan kinerja dapat dilakukan dengan menggunakan konsep yang memerlukan indikator-indikator sebagai berikut :

1. Indikator masukan (input), untuk mengukur sumberdaya seperti anggaran (dana), SDM, Peralatan, material dan masukan lainnya untuk melakukan suatu kegiatan.
2. Indikator keluaran (output), merupakan indicator yang diharapkan langsung dicapai dari suatu kegiatan, baik berupa fisik maupun non fisik.
3. Indikator hasil (outcome), merupakan indicator yang menunjukkan telah dicapainya maksud dan tujuan dari kegiatan-kegiatan yang telah selesai dilaksanakan.

Sedangkan laporan keuangan merupakan laporan pertanggungjawaban keuangan yang berebentuk laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan.

# Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra Kantor Kecamatan Malili Kabupaten Luwu Timur

Evaluasi ditujukan untuk menilai tingkat efektivitas kebijakan publik yang diimplementasikan oleh pemerintah sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban pemerintah kepada rakyat, selain itu evaluasi bertujuan untuk mengetahui pencapaian target-target pembangunan yang telah ditetapkan sebelumnya sesuai rencana. Dari tabel 2.1 dibawah ini dapat dilihat hasil capaian pelaksanaan program dan kegiatan Kantor Kecamatan Malili tahun 2021. Realisasi Tahun 2021 sebagai tahun awal periode Renstra Kantor Kecamatan Malili.

Review hasil evaluasi pelaksanaan renja Kantor Kecamatan Malili tahun 2021 mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan atau realisasi APBD. Pada tahun 2021 Kantor Kecamatan Malili melaksanakan 5 (lima) program dengan 13 (tiga belas) kegiatan dan 33 (tiga puluh tiga) sub kegiatan. Total pagu anggaran Kantor Kecamatan Malili tahun 2021 (pergeseran ke-2) adalah Rp. 4.419.696.654,- dengan Realisasi total sampai dengan triwulan I adalah sebesar Rp. 94.496.780,- (2,20%). Untuk lebih jelasnya kinerja Kantor Kecamatan Malili pada tahun 2021 dapat dilihat pada table dibawah ini :

**TABEL 2.1**

**EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DAN PENCAPAIAN RENSTRA KANTOR KECAMATAN MALILI KAB. LUWU TIMUR**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Sasaran** | **Program/ Kegiatan** | **Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)** | **Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2026** | **Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s/d Renja PD tahun lalu (n-2) / (2020)** | **Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun Berjalan (n-1)****2021** | **Realisasi Kinerja Pada Triwulan (2021)** | **Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran PD yang dievaluasi****(2021)** | **Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2026** | **Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun 2021** | **Unit** **Perangkat Daerah Penanggung Jawab** |
| **I** | **II** | **III** | **IV** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** | **15** |
| **K** | **Rp** | **K** | **Rp** | **K** | **Rp** | **K** | **Rp** | **K** | **Rp** | **K** | **Rp** | **K** | **Rp** | **K** | **Rp** | **K** | **Rp** |  |
| 1 | **Meningkatnya Kemampuan Pelayanan Publik Penyelenggara****an Urusan Pemerintahan Kecamatan Malili** | **PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK** | **Persentase capaian kinerja peningkatan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik ('%)** |  |  | **−** | **−** | **100%** | **89.691.000** | **−** | **1.354.200** | **−** | **−** | **−** | **−** |  | **1.354.200** | **−** | **−** | **−** | **-** | **−** |
|  |  | **Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat** | **Persentase capaian kinerja peningkatan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik ('%)** |  |  | **−** | **−** | **100%** | **89.691.000** | **−** | **1.354.200** | **−** | **−** | **−** | **−** |  | **1.354.200** | **−** | **−** | **−** | **-** | **−** |
|  |  | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan  | Persentase urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat yang dilaksanakan ('%) |  |  | **−** | **−** | 400 | **89.691.000** | 100 | **1.354.200** | - | **−** | **−** | **−** | 100 | **1.354.200** | **−** | **−** | **25%** | 1.51% | **−** |
|  |  | **PROGRAM PEMBERDAYA AN MASYARAKAT** | **Persentase Capaian Kinerja Pemberdayaan masyarakat Desa dan Kelurahan ('%)** |  |  | **−** | **−** | **−** | **407.916.470** | **−** |  | **−** | **-** | **−** | **−** | **−** |  | **−** | **−** | **−** |  | **−** |
|  |  | **Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**  | **Persentase koordinasi kegiatan pemberdayaan desa yang dilaksanakan ('%)** |  |  | **−** | **−** | **100%** | **88.901.350** | **−** | **35.114.790** | **−** | **-** | **−** | **−** | **−** | **35.114.790** | **−** | **−** | **−** |  | **−** |
|  |  | - Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa | Jumlah Partisipasi Masyarakat Pada pelaksanaan Musrenbang Kecamatan (Orang) |   |  | **−** | **−** | 100% |  35.501.690  | 100 | 27.746.290 | **−** | **−** | **−** | **−** | 100 | 27.746.290 | **−** | **−** | 100.00% | 78.15%% | **−** |
|  |  | - Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | Jumlah kader PKK Desa yang diberdayakan (Orang) |   |  | **−** | **−** | 100% |  53.399.660  |  | 7.368.500 | - | - | **−** | **−** |  | 7.368.500 | **−** | **−** |  | 13.80% | **−** |
|  |  | **Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan** | **Persentase Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan ('%)** |   |  | **−** | **−** | **100%** | **319.015.120** | **−** | **−** | **−** |  **-** | **−** | **−** | **−** |  | **−** | **−** | **−** | **37%** | **−** |
|  |  | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | Jumlah kegiatan kelurahan yang memberdayakan masyarakat (kegiatan) |   |  | **−** | **−** | **100%** | **131.115.120** | **−** |  | **−** |  | **−** | **−** | **−** | **−** | **−** | **−** | **−** | **−** | **−** |
|  |  | - Pembangunan Sarana dan Pra sarana | Jumlah sarana dan prasarana kelurahan yang dibangun (kegiatan) |   |  | **−** | **−** | 100% | 187.900.000 | - | - | - | - | **−** | **−** | - | - |  |  | - | - |  |
|  |  | **PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM** | **Persentase rata rata capaian kinerja pelayanan ketentraman dan ketertiban umum ('%)** |  |  | **−** | **−** | **-** | **-** |  |  |  |  | **−** | **−** |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum** | **Persentase koordinasi upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum yang dilaksanakan ('%)** |  |  | **−** | **−** | **-** | **-** |  |  |  |  | **−** | **−** |  |  |  |  |  |  |   |
|  |  | Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat | Jumlah rapat dalam upaya himbauan atau pencegahan pelanggaran ketenteraman dan ketertiban yang dilaksanakan (Kali) |  |  | **−** | **−** | - | - |   |   |   |   | **−** | **−** |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | Jumlah Kasus Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Difasilitasi (Kasus) |  |  | **−** | **−** | - | - |   |   |   |   | **−** | **−** |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah** | **Persentase pelaksanaan koordinasi penerapan penegakan Perda dan Perkada ('%)** |  |  | **−** | **−** | **-** | **-** |  |  |  |  | **−** | **−** |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia | Jumlah koordinasi/sinergitas dengan Polri dan atau Perangkat Daerah bidang penegakan peraturan perundang-undangan yang dilaksanakan (Kali) |  |  | **−** | **−** | - | - |   |   |   |   | **−** | **−** |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM** | **Persentase Capaian Kinerja Penyelenggaran Pemerintahan Umum kecamatan ('%)** |  |  | **−** | **−** | **100** | **55.066.149** |  | **2.305.000** |  | **-** | **−** | **−** | **-** | **2.305.000** |  |  |  | **4.19%** |  |
|  |  | **Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah** | **Persentase rekomendasi Forum koordinasi pimpinan kecamatan yang ditindaklanjuti ('%)** |  |  | **−** | **−** | **100%** | **55.066.149** |  | **2.305.000** | **-** |  | **−** | **−** | **-** | **2.305.000** |  |  |  | **4.19%** |  |
|  |  | - Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan | Persentase rekomendasi Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan yang ditindaklanjuti ('%) |  |  | **−** | **−** | 100% | **55.066.149** |  | **2.305.000** | - | - | **−** | **−** | - | **2.305.000** |  |  |  | 4.19% |  |
|  |  | **PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA** | **Persentase penyelengaraan pemerintahan desa yang berjalan sesuai standar dan ketentuan perundangan yang berlaku ('%)** |  |  | **−** | **−** |  | **94.496.780** |  |  **2.076.000**  |  |  **-**  | **−** | **−** |  |  **2.076.000** |  |  |  | **2.20%** |  |
|  |  | **Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Daerah** | **Persentase fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan Pemerinthan Desa yang dilaksanakan ('%)** |  |  | **−** | **−** | **100%** | **94.496.780** |  |  **2.076.000** |  |  **-**  | **−** | **−** |  |  **2.076.000** |  |  |  | **2.20%** |  |
|  |  | -Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa | Jumlah Peraturan Desa dan peraturan kepala desa yang difasilitasi penyusunannya (Dokumen) |   |  | **−** | **−** | 14 | 8.585.595 | - | - | - | - | **−** | **−** | - | - |  |  | - | - |  |
|  |  | - Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum | Persentase kasus ketentraman dan ketertiban umum masyarakat yang ditindaklanjuti (persentase) |   |  | **−** | **−** | 100% | 55.668.465 | - | 2.076.000 | 100 | - | **−** | **−** | - | 2.076.000 |  |  | - | 3.73% |  |
|  |  | - Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya | Jumlah desa yang tertib administrasinya (desa)) |   |  | **−** | **−** | 100% | 30.242.720 | 1 | - | - | - | **−** | **−** | - | - |  |  | - | - |  |
| 2 | **Meningkatnya Capaian Kinerja dan Keuangan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kecamatan Malili** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KAB/KOTA** | **Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar ('%)** |  |  | **−** | **−** |  |  |  |  |  |  | **−** | **−** |  | **359.942.221** |  |  |  | **-** |  |
|  |  | **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | **Persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran & evaluasi tepat waktu ('%)** |  |  | **−** | **−** | **100%** | **79.018.564** |  | **-** |  | **-** | **−** | **−** |  | **7.558.500** |  |  |  |  |  |
|  |  | - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah dokumen Perencanaan Yang disusun Tepat Waktu (Dokumen) |   |  | **−** | **−** | 3 | 54.544.859 | 2 | 3.775.500 | - | - | **−** | **−** | 2 | 3.775.500 |  |  | 66.67% | 69.22% |  |
|  |  | - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Jumlah dokumen RKA- SKPD yang disusun Tepat Waktu (Dokumen) |   |  | **−** | **−** | 2 | 15.397.355 | 1 | 3.783.000 | - | - | **−** | **−** | 1 | 3.783.000 |  |  | 50% | 24.57% |  |
|  |  | - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | Jumlah dokumen DPA- SKPD yang disusun Tepat Waktu (Dokumen) |   |  | **−** | **−** | - |  |  |  | - | - | **−** | **−** |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah dokumen evaluasi kinerja pelayanan perangkat daerah yang disusun (Dokumen) |   |  | **−** | **−** | 10 | 9.076.350 |  |  | - | - | **−** | **−** |  |  |  |  | 0% | 0% |  |
|  |  | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | **Persentase administrasi keuangan yang terselenggara dengan baik ('%)** |  |  | **−** | **−** | **100%** | **2.274.457.166** |  |  |  | **-** | **−** | **−** |  | **278.213.212** |  |  |  |  |  |
|  |  | - Penyediaan Gaji dan tujangan ASN | Jumlah ASN yang gaji dan tunjangan terbayarkan (Orang) |   |  | **−** | **−** | 24 | 2.215.160.786 | 24 | 277.873.212 | - | - | **−** | **−** | 24 | 277.873.212 |  |  | 100% | 12.54% |  |
|  |  | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | Jumlah dokumen laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD yang disusun Tepat Waktu (Dokumen) |   |  | **−** | **−** | 3 | 59.296.380 |  | 340.000 |   |   | **−** | **−** |  | **340.000** |  |  | **0.00%** | **0.57%** |  |
|  |  | **Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah** | **Persentase BMD yang Diadministrasikan sesuai standar ('%)** |  |  | **−** | **−** | **100%** | **13.949.920** |  |  |  |  | **−** | **−** |  | **780.000** |  |  |  |  |  |
|  |  | - Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | Jumlah dokumen perencanaan kebutuhan barang milik daerah SKPD yang disusun (Dokumen) |  |  | **−** | **−** | 4 | **13.949.920** | 1 | 780.000 |  |  | **−** | **−** | 1 | 780.000 |  |  | 25% | 5.59% |  |
|  |  | **Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah** | **Persentase Realisasi Pendapatan Daerah Kewenangan PD ('%)** |  |  | **−** | **−** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah | Jumlah dokumen laporan pengelolaan retribusi daerah yang disusun (Dokumen) |  |  | **−** | **−** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah** | **Persentase Rara-rata Capaian kinerja Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah ('%)** |  |  | **−** | **−** |  | **122.380.069** |  |  |  |  | **−** | **−** |  | **1.834.000** |  |  |  |  |  |
|  |  | - Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | Jumlah pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya yang diadakan (stel) |   |  | **−** | **−** | 63 | 28.900.000 | - | 0 |  | - | **−** | **−** | 0 | 0 |  |  | 0% | 0% |  |
|  |  | Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | Persentase kelengkapan data administrasi kepegawaian ('%) |   |  | **−** | **−** | 4 | 48.300.000 | 0 | 1.834.000 | - | - | **−** | **−** | **0** | **1.834.000** |  |  | **0%** | **3.80%** |  |
|  |  | - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | Jumlah ASN yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang - undangan (Orang) |   |  | **−** | **−** | 10 | 45.180.000 | 0 | 0 | - | - | **−** | **−** | **0** | **0** |  |  | 0.00% | 0.00% |  |
|  |  | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | **Persentase Rata- Rata Capaian Kinerja administrasi umum PD ('%)** |  |  | **−** | **−** | **100%** | **681.432.900** |  |  |  |  | **−** | **−** |  | **40.765.700** |  |  |  |  |  |
|  |  | - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang di sediakan (jenis) |  |  | **−** | **−** | 20 | 6.604.300 | 5 | 1.352.100 | - | - | **−** | **−** | 5 | 1.352.100 |  |  | 25% | 20.47% |  |
|  |  | - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Jumlah peralatan rumah tangga yang diadakan (Unit) |  |  | **−** | **−** | - | - | - | - | -- | - | **-** | **-** | - | - |  |  | - | - |  |
|  |  | - Penyediaan Bahan Logistik Kantor  | Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan (jenis) |  |  | **−** | **−** | 310 | 59.304.000 | 310 | 2.908.000 | - | - | **−** | **−** | 310 | 2.908.000 |  |  | 100.00% | 4.90% |  |
|  |  | - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Barang cetakan dan/atau penggandaan yang disediakan (jenis) |  |  | **−** | **−** | 103.000 | 45.089.900 | 25.750 | 4.715.000 | - | - | **−** | **−** | 25.750 | 4.715.000 |  |  | 25.00% | 4.90% |  |
|  |  | - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan | Jumlah Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang- undangan (eksamplar) |  |  | **−** | **−** | 20 | 9.900.000 | 5 | 1.690.000 | - | - | **−** | **−** | 5 | 1.690.000 |  |  | 25% | 17.07% |  |
|  |  | - Fasilitas Kunjungan Tamu | Jumlah tamu yang difasilitasi (Orang) |  |  | **−** | **−** | 7417 | 123.580.000 | 1854 | 8.754.000 | - | - | **−** | **−** | 1854 | 8.754.000 |  |  | 25% | 7.08% |  |
|  |  | - Penyelenggaran Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi SKPD yang diikuti (kali) |  |  | **−** | **−** | 15 | 436.954.700 | 3 | 21.346.600 | - | - | **−** | **−** | 3 | 21.346.600 |  |  | 20% | 4.89% |  |
|  |  | **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | **Persentase BMD-PD penunjang yang terpenuhi ('%)** |  |  | **−** | **−** | **13** | **38.260.000** | **-** | **-** | **-** |  **-**  | **−** | **−** | **-** |  **-**  |  |  |  | **-** |  |
|  |  | Pengadaan Mebel | Jumlah mebel yang diadakan (unit) |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah kendaraan dinas yang diadakan (Unit) |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang diadakan (Unit) |  |  | **-** | **−** | 13 | 38.260.000 | - | - | - | - | **−** | **−** |  |  |  |  | **-** | **-** |  |
|  |  | - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang diadakan (Unit) |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | **Persentase Rata-Rata Capaian Kiner jasa penunjang urusan pemerintahan daerah ('%)** |  |  | **−** | **−** | **100%** | **437.112.723** |  | **-** | **-** | **-** | **−** | **−** |  | **25.597.839** | **-** |  | **-** | **-** |  |
|  |  | - Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah surat masuk dan keluar yang diadministrasikan (Surat) |  |  | **−** | **−** | 2400 | 19.098.223 | - | 2.938.500 | - | - | **−** | **−** | - | 2.938.500 |  |  | 0% | 15.39% |  |
|  |  | - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah rekening telepon, listrik dan air yang terbayarkan (Rekening) |  |  | **−** | **−** | 16 | 121.680.000 | 16 | 22.659.339 | - | - | **−** | **−** | 16 | 22.659.339 |  |  | 100% | 18.62% |  |
|  |  | - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang sediakan (jenis) |  |  | **−** | **−** | - | 24351000 | - | - | - | - | **−** | **−** | - | - |  |  | 0.00% | 0.00% |  |
|  |  | - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah jasa tenaga pelayanan umum kantor yang dibayarkan (Orang) |  |  | **−** | **−** | 4 | 17.334.500 | 0 | 0 | - | - | **−** | **−** | 21 | 127,250,000 |  |  | 0% | 0% |  |
|  |  | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | **Persentase Barang Milik Daerah penunjang urusan pemerintahan yang terpelihara dengan baik ('%)** |  |  | **−** | **−** | **100%** | **125.915.000** |  |  |  |  |  |  |  | **5.192.570** |  |  |  |  |  |
|  |  | - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah kendaraan perorangan dinas atau jabatan yang dipelihara (unit) |  |  | **−** | **−** | 8 | 32.615.000 | 2 | 2.637.570 | - | - | **−** | **−** | 2 | 2.637.570 |  |  | 25% | 8.09% |  |
|  |  | - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara (Unit) |   |  | **−** | **−** | 8 | 17,800,000 | 2 | 2.555.000 | - | - | **−** | **−** | 2 | 2.555.000 |  |  | 25% | 14.35% |  |
|  |  | - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah gedung kantor dan/atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi (Unit) |   |  | **−** | **−** | 4 | 75.500.000 | 0 | 0 | - | - | **−** | **−** | 4 | 75.500.000 |  |  | 0% | 0% |  |
|  |  | Pemeliharaan Mebel | Jumlah mebel yang dipelihara (Unit) |   |  | **−** | **−** | - | - | - | - | - | - | **−** | **−** |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **JUMLAH** |   |  |  |  |  | **4.419.696.211** |  | **94.496.780** |  |  |  |  |  | **94.496.780** |  |  |  | **2.20%** |  |

# Analisis Kinerja Kantor Kecamatan Malili

#  Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 56 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas dan fungsi serta Tata Kerja Kecamatan., Organisasi Kecamatan merupakan satuan kerja perangkat daerah yang mempunyai peran sebagai unsur pelaksana urusan pemerintahan di wilayah kecamatan yang menjadi kewenangan daerah. Satuan kerja perangkat daerah kecamatan dipimpin oleh Camat yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

#  Mengacu Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang pelaksanaan peraturan pemerintah nomor 8 tahun 2008 tentang tahapan tatacara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanan rencana pembangunan daerah, maka SKPD membuat laporan evaluasi atas rencana kerja yang dilaksanakan setiap periode pembangunan yang mengacu ke rencana stategis dan RPJMD.

#  Pengukuran Kinerja Kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran dilakukan melalui : Penetapan Indikator Kinerja yaitu ukuran kuantitaf dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang talah ditetapkan. Indikator kinerja kegiatan meliputi indikator masukan (input), keluaran (output), hasil (outcome), manfaat (benefits) dan dampak (infac). Indikator-indikator tersebut dapat berupa dana, sumber daya manusia, laporan dan indikator lainnya. Selanjutnya dilakukan analisis capaian kinerja atas sasaran yang didasarkan atas hasil pengukuran kinerja kegiatan dalam suatu sasaran dilakukan analisis pencapaian kinerja atas sasaran tersebut. Analisis terhadap capaian kinerja pelayanan OPD dilakukan berdasarkan indikator yang sudah ditentukan dalam Standar Pelayanan Minimal (SPM), Indikator Kinerja Kunci (IKK) maupun terhadap Indikator Kinerja Utama (IKU). Yang terdiri atas 2 (dua) Indikator Kinerja Utama dan tingkat capaiannya dapat dilihat pada tabel 2 berikut ini :

**Tabel. 2.2**

**Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah**

**Kecamatan Malili Kabupaten Luwu Timur**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Indikator Sasaran** | **Target** | **Realisasi Capaian** |
| **2016** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** |
| Indeks Kepuasan Masyarakat    | 0 | 67 | 74 | 79 | 79 | 92 | 0 | 65.66 | 80.45 | 81 | - |
| Nilai Score Lakip Kecamatan   | 0 | 50 | 50 | 55 | 60 | 60.18 | 0 | 65.66 | 60 | 62 | - |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Penjelasan pencapaian kinerja Kecamatan Malili sebagai berikut :

* + 1. **Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan Malili**

Untuk melihat perbandingan capaian antara target dan realisasi tahun 2020 dengan tahun 2021 terkait pelayanan publik di Kecamatan Malili. Target dan realisasi pelayanan publik dengan menggunakanan peraturan Menpan dan RB nomor 16 Tahun 2016 tentang pedoman survey kepuasan masyarakat. Pada Tahun 2020 Kantor Kecamatan Malili sudah menggunakan survey kepuasan masyarakat dan nilai survey menunjukkan kategori melampaui target dengan target survey 79 dan terealisasi 81, artinya pelayanan yang ada dikecamatan Malili baik perizinan maupun non perizinan cukup baik walaupun masih ada permasalahan-permasalahan yang disebabkan antara lain masih kurangnya sosialisasi dari pemerintah desa dan kelurahan tentang informasi terkait syarat dan ketentuan pelayanan. Sedangkan pada Tahun 2021 dengan target Indeks Kepuasan Masyarakat 92 namun realisasi belum bisa digambarkan disebabkan indeks kepuasan Masyarakat untuk Tahun 2021 baru sampai triwulan I sedangkan penilaian dilakukan sampai akhir tahun 2021.

* + 1. **Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Malili**

Untuk melihat perbandingan capaian antara target dan realisasi tahun 2020 dengan tahun 2021 terkait akuntabilitas kinerja di Kecamatan Malili. Pada tahun 2020 target dan realisasi nilai AKIP dengan target 60 dan terealisasi CC (62) dan tahun 2021 dengan target nilai B (60.18) namun realisasi belum bias digambarkan disebabkan penilaian dilakukan pada awal Tahun 2022. Capaian pada tahun 2020 mengalami penurunan dari tahun sebelumnya, dikarenakan masih sulit untuk menggambarkan capaian-capaian baik capaian program maupun capaian kegiatan, disebabkan beberapa hal yaitu :

* Masih ada Indikator kegiatan tidak dapat di ukur
* Pendukung atas capaian program dan kegiatan belum maksimal

# Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kantor Kecamatan Malili

Beberapa isu penting dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Kantor Kecamatan Malili Kabupaten Luwu Timur yang perlu mendapat perhatian dalam perencanaan kegiatan tahun 2022 antara lain :

1. Sarana dan prasarana belum lengkap sesuai dengan kebutuhan
2. Sistem dan prosedur kerja yang belum optimal
3. Masih rendah pemahaman dan kesadaran masyarakat dalam mematuhi peraturan daerah
4. Kemampuan personil kecamatan terbatas
5. Keterbatasan anggaran
6. Masih kurangnya tingkat partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan. Partisipasi masyarakat khususnya dari kelompok perempuan dari segi kehadiran bisa dikatakan cukup baik hanya saja masih kurang dalam memberikan usulan yang berkaitan dengan pemberdayaan kelompok perempuan dalam musrenbang. Sehingga sebagian besar usulan dalam musrenbang adalah berkaitan dengan infrastruktur.
* **Aspek kajian dari sumber daya manusia**

Aparatur pemerintah sebagai abdi masyarakat dituntut untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat agar apa yang menjadi visi dan misi SKPD bisa terwujud. Apabila dilihat pada saat ini antara jumlah dan kemampuan pegawai dibanding dengan beban tugas masih kurang memadai. Faktor yang mempengaruhi secara intern yaitu motivasi kerja dan secara ekstern meliputi tuntutan untuk selalu memperbaiki kinerja, dukungan dari atasan, sistem pengendalian intern atau pengawasan melekat belum berjalan sebagaimanana mestinya.

* **Aspek kajian dari sarana dan prasarana**

Kondisi saat ini dengan terbatasnya sarana dan prasarana penunjang dengan faktor yang mempengaruhi baik internal maupun faktor eksternal, aparatur kecamatan tetap dituntut untuk meningkatkan kinerja dalam rangka pelayanan masyarakat. Masyarakat berhak untuk mendapatkan pelayanan yang sebaik-baiknya. Namun dengan sarana dan prasarana yang terbatas di kantor kecamatan Malili, pelayanan prima masih belum bisa dilaksanakan secara maksimal. Dengan kondisi tersebut aparatur kecamatan harus dapat mengoptimalkan sarana dan prasarana yang ada, tanpa mengganggu proses pelayanan masyarakat

* **Aspek kajian dari jumlah anggaran**

Kurang seimbangnya dukungan anggaran dibandingkan dengan beban tugas yang dilaksanakan dengan faktor yang mempengaruhi secara internal dengan tugas pembantuan sebagian kewenangan yang diberikan bupati kepada camat belum disertai dengan sumber daya manusia, keuangan, materi dan methodologinya dengan permasalahan / tantangan yakni aparatur pemerintah sebagai abdi masyarakat dituntut selalu untuk berusaha meningkatkan pelayanan kepada masyarakat agar apa yang menjadi visi dan misi SKPD bisa terwujud.

Untuk mengoptimalkan capaian kinerja Kantor Kecamatan Malili dilakukan beberapa hal :

1. Mengusulkan penambahan sumber daya manusia baik PNS maupun Upah Jasa ke BKD dalam upaya peningkatan sumber daya.
2. Mengoptimalkan sarana dan prasarana yang ada di kantor kecamatan Malili untuk dapat memberikan pelayanan publik yang sebaik-baiknya kepada masyarakat.
3. Turut mengundang dan mensosialisasikan kepada kelompok perempuan agar dapat lebih berperan aktif didalam kegiatan musrenbang, sehingga kelompok perempuan dapat lebih di berdayakan.

# Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Review adalah aktifitas untuk mengevaluasi pelaksanaan kebijakan , program dan kegiatan yang telah ditetapkan. Renja disusun dengan berpedoman kepada rencana strategis (RENSTRA) Kecamatan Malili serta mengacu pada Renja Perangkat daerah (RKPD). Sebagai dokumen perencanaan pembangunan yang sesuai dengan amanat undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistim perencanaan pembangunan nasional, maka RKPD merupakan pedoman bagi penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD), Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan prioritas Flapon Anggaran Sementara (PPAS). Rancangan awal Renja SKPD ini disusun berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan program tahun sebelumnya dengan memperhatikan dokumen Renstra SKPD dan analisa kebutuhan masyarakat pada kegiatan Musrenbang. Penyusunan RKPD disusun melalui tahapan-tahapan proses perencanaaan pembangunan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 yaitu melalui penjabaran visi dan misi dalam rencana pembangunan jangkah menengah daerah (RPJMD) Kabupaten Luwu Timur. Perencanaan yang dilakukan oleh lembaga atau organisasi/perencanaan dengan memperhatikan partisipasi masyarakat melalui pelaksanaan forum perangkat daerah serta musyawarah perencanaan pembangunan (MUSRENBANG) yang diselenggarakan secara berjenjang sehingga terjadi keterpaduan Rancangan Renja Perangkat daerah.

Adapun perbandingan antara RKPD 2022 dengan rancangan awal usulan RKPD Kantor Kecamatan Malili Kab. Luwu Timur tahun 2022 sebagai berikut:

|  |  |
| --- | --- |
| **Tabel 2.3** |  |
|  **Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2022** |  |
| **Kabupaten Luwu Timur** |  |
| **SKPD** : **KANTOR KECAMATAN MALILI** |
| **No.** | **Rancangan Awal RKPD** | **Hasil Analisis Kebutuhan** | **Catatan Penting** |
| **Program/Kegiatan** | **Indikator Kinerja**  | **Lokasi** | **Target Capaian Kinerja** | **Pagu Indikatif** | **Program/Kegiatan** | **Indikator Kinerja**  | **Lokasi** | **Target Capaian Kinerja** | **Kebutuhan Dana** |
|  *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* | *11* | *12* |
| **I** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar ('%)** | **Kantor Kec. Malili** | **100%** | **3.557.892.848** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar ('%)** | **Kantor Kec. Malili** | **100%** | **3.557.892.848** |   |
| 1 | **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | **Persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran & evaluasi tepat waktu ('%)** | **Kantor Kec. Malili** | **100%** | **18.385.460** | **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | **Persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran & evaluasi tepat waktu ('%)** | **Kantor Kec. Malili** | **100%** | **18.385.460** |   |
| 2 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah dokumen Perencanaan Yang disusun Tepat Waktu (Dokumen) | Kantor Kec. Malili | 3 dokumen | 5.000.000 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah dokumen Perencanaan Yang disusun Tepat Waktu (Dokumen) | Kantor Kec. Malili | 3 dokumen | 5.000.000 |   |
| 3 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Jumlah dokumen RKA- SKPD yang disusun Tepat Waktu (Dokumen) | Kantor Kec. Malili | 2 dokumen | 4.999.880 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Jumlah dokumen RKA- SKPD yang disusun Tepat Waktu (Dokumen) | Kantor Kec. Malili | 2 dokumen | 4.999.880 |   |
| 4 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | Jumlah dokumen DPA- SKPD yang disusun Tepat Waktu (Dokumen) | Kantor Kec. Malili | 2 dokumen | 4.999.800 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | Jumlah dokumen DPA- SKPD yang disusun Tepat Waktu (Dokumen) | Kantor Kec. Malili | 2 dokumen | 4.999.800 |   |
| 5 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah dokumen evaluasi kinerja pelayanan perangkat daerah yang disusun (Dokumen) | Kantor Kec. Malili | 10 dokumen | 3.385.780 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah dokumen evaluasi kinerja pelayanan perangkat daerah yang disusun (Dokumen) | Kantor Kec. Malili | 10 dokumen | 3.385.780 |   |
| 6 | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** |  | **Kantor Kec. Malili** | **100%** | **2.181.955.476** | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** |  | **Kantor Kec. Malili** | **100%** | **2.181.955.476** |  |
| 7 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah ASN yang gaji dan tunjangan terbayarkan (Orang) | Kantor Kec. Malili | 2 orang | 2.154.370.786 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah ASN yang gaji dan tunjangan terbayarkan (Orang) | Kantor Kec. Malili | 2 orang | 2.154.370.786 |  |
| 8 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD | Jumlah Dokumen Laporan keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD yang disusun tepat waktu | Kantor Kec. Malili | 18 dokumen | 27.584.690 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD | Jumlah Dokumen Laporan keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD yang disusun tepat waktu | Kantor Kec. Malili | 18 dokumen | 27.584.690 |  |
| 9 | **Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah** |  | **Kantor Kec. Malili** | **100%** | **13.949.920** | **Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah** |  | **Kantor Kec. Malili** | **100%** | **13.949.920** |  |
| 10 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | Jumlah Dokumen Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD yang disusun | Kantor Kec. Malili | 2 dokumen | 13.949.920 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | Jumlah Dokumen Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD yang disusun | Kantor Kec. Malili | 2 dokumen | 13.949.920 |   |
| 11 | **Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah** |  | **Kantor Kec. Malili** |  | **30.298.269** | **Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah** |  | **Kantor Kec. Malili** |  | **30.298.269** |   |
| *12* | Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | Jumlah Laporan Data Administrasi Kepegawaian yang dimutakhirkan | Kantor Kec. Malili | 100% | 10.998.269 | Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | Presentase kelengkapan data administrasi kepegawaian | Kantor Kec. Malili | 100% | 10.998.269 |  |
| *13* | Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan | Jumlah ASN yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang - undangan (Orang) | Kantor Kec. Malili | 10 orang | 19,300,000.00 | Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan | Jumlah ASN yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang - undangan (Orang) | Kantor Kec. Malili | 10 orang | 19,300,000.00 |  |
| *14* | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | **Persentase Rata- Rata Capaian Kinerja administrasi umum PD ('%)** | **Kantor Kec. Malili** |  | **499.013.500** | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | **Persentase Rata- Rata Capaian Kinerja administrasi umum PD ('%)** | **Kantor Kec. Malili** |  | **455.268.800** |  |
| *15* | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang di sediakan (jenis) | Kantor Kec. Malili | 15 Jenis | 6.604.300 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang di sediakan (jenis) | Kantor Kec. Malili | 15 unit | 6.084.550 |  |
| *16* | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan (jenis) | Kantor Kec. Malili | 15 Jenis | 63.618.100 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan (jenis) | Kantor Kec. Malili | 3 orang | 48.916.800 |  |
| *17* | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Barang cetakan dan/atau penggandaan yang disediakan (jenis) | Kantor Kec. Malili | 2000 exm | 5.786.400 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Barang cetakan dan/atau penggandaan yang disediakan (jenis) | Kantor Kec. Malili | 2000 exm | 5.786.400 |  |
| *18* | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Jumlah Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang- undangan (examplar) | Kantor Kec. Malili | 8 Jenis | 9.900.000 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Jumlah Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang- undangan (examplar) | Kantor Kec. Malili | 8 Jenis | 9.900.000 |  |
| *19* | Fasilitasi Kunjungan Tamu | Jumlah tamu yang difasilitasi (Orang) | Kantor Kec. Malili | 3540 kotak | 124.030.000 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | Jumlah tamu yang difasilitasi (Orang) | Kantor Kec. Malili | 3540 kotak | 124.030.000 |  |
| *20* | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi SKPD yang diikuti (kali) | Kantor Kec. Malili | 350 kali | 289.074.700 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi SKPD yang diikuti (kali) | Kantor Kec. Malili | 350 kali | 289.074.700 |  |
| *21* | **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah daerah** | **Persentase BMD-PD penunjang yang terpenuhi ('%)** | **Kantor Kec. Malili** | **100%** | **275.000.000** | **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah daerah** | **Persentase BMD-PD penunjang yang terpenuhi ('%)** | **Kantor Kec. Malili** | **100%** | **275.000.000** |  |
| *22* | Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Dinas yang diadakan | Kantor Kec. Malili | 1 Unit | 275.000.000 | Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Dinas yang diadakan | Kantor Kec. Malili | 1 Unit | 275.000.000 |  |
| *23* | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | **Persentase Rata-Rata Capaian Kiner jasa penunjang urusan pemerintahan daerah (%)** | **Kantor Kec. Malili** | **100%** | **463.425.223** | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | **Persentase Rata-Rata Capaian Kiner jasa penunjang urusan pemerintahan daerah ('%)** | **Kantor Kec. Malili** | **100%** | **413.566.487** |  |
| *24* | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah surat masuk dan keluar yang diadministrasikan (Surat) | Kantor Kec. Malili | 850 surat | 19.245.223 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah surat masuk dan keluar yang diadministrasikan (Surat) | Kantor Kec. Malili | 850 surat | 19.245.223 |  |
| *25* | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah rekening telepon, listrik dan air yang terbayarkan (Rekening) | Kantor Kec. Malili | 36 rekening | 113.880.000 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah rekening telepon, listrik dan air yang terbayarkan (Rekening) | Kantor Kec. Malili | 36 rekening | 113.880.000 |  |
| *26* | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah jasa tenaga pelayanan umum kantor yang dibayarkan (Orang) | Kantor Kec. Malili | 37 orang | 330.300.000 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah jasa tenaga pelayanan umum kantor yang dibayarkan (Orang) | Kantor Kec. Malili | 37 orang | 330.300.000 |  |
| *27* | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | **Persentase Barang Milik Daerah penunjang urusan pemerintahan yang terpelihara dengan baik ('%)** | **Kantor Kec. Malili** | **100%** | **75.865.000** | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | **Persentase Barang Milik Daerah penunjang urusan pemerintahan yang terpelihara dengan baik ('%)** | **Kantor Kec. Malili** | **100%** | **118.741.200** |  |
| *28* | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak | Jumlah kendaraan perorangan dinas atau jabatan yang dipelihara (unit) | Kantor Kec. Malili | 4 unit | 2.565.000 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak | Jumlah kendaraan perorangan dinas atau jabatan yang dipelihara (unit) | Kantor Kec. Malili | 4 unit | 2.565.000 |  |
| *29* | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara (Unit) | Kantor Kec. Malili | 17 unit | 17.800.000 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara (Unit) | Kantor Kec. Malili | 17 unit | 17.800.000 |  |
| *30* | Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya  | Jumlah gedung kantor dan/atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi (Unit) | Kantor Kec. Malili | 5 unit | 55.500.000 | Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya  | Jumlah gedung kantor dan/atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi (Unit) | Kantor Kec. Malili | 5 unit | 55.500.000 |  |
| *II* | **PROGRAM PENYELENGGARA AN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK** | **Persentase capaian kinerja peningkatan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik ('%)** | **Kantor Kec. Malili** | **100%** | **87.664.860** | **PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK** | **Persentase capaian kinerja peningkatan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik ('%)** | **Kantor Kec. Malili** | **100%** | **87.664.860** |  |
| *1* | **Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan** | **Persentase urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan ('%)** | **Kantor Kec. Malili** | **100%** | **49.991.660** | **Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan** | **Persentase urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan ('%)** | **Kantor Kec. Malili** | **100%** | **49.991.660** |  |
| *2* | Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan | Presentase efektifitas pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan | Kantor Kec. Malili | 100% | 49.991.660 | Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan | Presentase efektifitas pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan | Kantor Kec. Malili | 100% | 49.991.660 |  |
| *3* | **Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan Kepada Camat** | **Persentase urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat yang dilaksanakan ('%)** | **Kantor Kec. Malili** | **100%** | **37.673.200** | **Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan Kepada Camat** | **Persentase urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat yang dilaksanakan ('%)** | **Kantor Kec. Malili** | **100%** | **37.673.200** |  |
| *4* | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang dilimpahkan | Jumlah administrasi perizinan yang dikeluarkan | Kantor Kec. Malili | 200 lembar | 37.673.200 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang dilimpahkan | Jumlah administrasi perizinan yang dikeluarkan | Kantor Kec. Malili | 200 lembar | 37.673.200 |   |
| *III* | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN** | **Persentase Capaian Kinerja Pemberdayaan masyarakat Desa dan Kelurahan ('%)** | **Kantor Kec. Malili** | **100%** | **140.780.720** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN** | **Persentase Capaian Kinerja Pemberdayaan masyarakat Desa dan Kelurahan ('%)** | **Kantor Kec. Malili** | **100%** | **140.780.720** |  |
| *1* | **Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa** | **Persentase koordinasi kegiatan pemberdayaan desa yang dilaksanakan ('%)** | **Kantor Kec. Malili** | **100%** | **24.999.680** | **Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa** | **Persentase koordinasi kegiatan pemberdayaan desa yang dilaksanakan ('%)** | **Kantor Kec. Malili** | **100%** | **24.999.680** |  |
| *2* | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa | Persentase Partisipasi Perempuan Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa | Kantor Kec. Malili | 100% | 24.999.680 | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa | Persentase Partisipasi Perempuan Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa | Kantor Kec. Malili | 100% | 24.999.680 |  |
| *3* | **Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan** | **Persentase Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan ('%)** | **Kantor Kec. Malili** | **100%** | **115.781.040** | **Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan** | **Persentase Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan ('%)** | **Kantor Kec. Malili** | **100%** | **115.781.040** |  |
| *4* | Pemberdayaan Masyarakat di kelurahan | Presentase sarana dan prasarana yang dilaksanakan masyarakat | Kantor Kec. Malili | 100% | 115.781.040 | Pemberdayaan Masyarakat di kelurahan | Jumlah kegiatan kelurahan yang memberdayakan masyarakat | Kantor Kec. Malili | 100% | 115.781.040 |  |
| *IV* | **PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM** | **Persentase Capaian Kinerja Ketentraman dan Ketertiban Umum('%)** | **Kantor Kec. Malili** | **100%** | **12.999.271** | **PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM** | **Persentase Capaian Kinerja Ketentraman dan Ketertiban Umum('%)** | **Kantor Kec. Malili** | **100%** | **12.999.271** |  |
| *1* | **Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum** | **Persentase koordinasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum ('%)** | **Kantor Kec. Malili** | **100%** | **7.999.480** | **Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum** | **Persentase koordinasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum ('%)** | **Kantor Kec. Malili** | **100%** | **7.999.480** |  |
| *2* | Sinergitas denganKepolisian NegaraRepublik Indonesia,Tentara Nasional Indonesiadan Instansi Vertikal diWilayah Kecamatan | Persentase UpayaPenyelesaian KasusPenyelenggaraan KasusPelanggaran keamanandan Ketertiban sertaPersoalan Sosial yangDifasilitasi | Kantor Kec. Malili | 95% | 4.999.765 | Sinergitas denganKepolisian NegaraRepublik Indonesia,Tentara Nasional Indonesiadan Instansi Vertikal diWilayah Kecamatan | Persentase UpayaPenyelesaian KasusPenyelenggaraan KasusPelanggaran keamanandan Ketertiban sertaPersoalan Sosial yangDifasilitasi | Kantor Kec. Malili | 95% | 4.999.765 |  |
| *3* | Harmonisasi HubunganDengan Tokoh Agama danTokoh Masyarakat | Jumlah Rapat dalam UpayaHimbauan atauPencegahan PelanggaranKetentraman danKetertiban yangdilaksanakan | Kantor Kec. Malili | 2 Kegiatan | 2.999.715 | Harmonisasi HubunganDengan Tokoh Agama danTokoh Masyarakat | Jumlah Rapat dalam UpayaHimbauan atauPencegahan PelanggaranKetentraman danKetertiban yangDilaksanakan | Kantor Kec. Malili | 2 Kegiatan | 2.999.715 |  |
| *4* | **Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah** | **Persentase koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah ('%)** | **Kantor Kec. Malili** | **100%** | **4.999.791** | **Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah** | **Persentase koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan daerah dan Peraturan Kepala Daerah yang dilaksanakan** | **Kantor Kec. Malili** | **100%** | **4.999.791** |  |
| *5* | Koordinasi/Sinergi DenganPerangkat Daerah yangTugas dan Fungsinya diBidang PenegakanPeraturan Perundang-Undangan dan/atauKepolisian NegaraRepublik Indonesia | JumlahKoordinasi/Sinergitasdengan Polri dan/atauPerangkat Daerah BidangPenegakan PeraturanPerundang-undangan yangdilaksanakan | Kantor Kec. Malili | 12 Kali | 4.999.791 | Koordinasi/Sinergi DenganPerangkat Daerah yangTugas dan Fungsinya diBidang PenegakanPeraturan Perundang-Undangan dan/atauKepolisian NegaraRepublik Indonesia | JumlahKoordinasi/Sinergitasdengan Polri dan/atauPerangkat Daerah BidangPenegakan PeraturanPerundang-undangan yangDilaksanakan | Kantor Kec. Malili | 12 Kali | 4.999.791 |  |
| *V.* | **PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM** | **Persentase Capaian Kinerja Penyelenggaran Pemerintahan Umum kecamatan ('%)** | **Kantor Kec. Malili** | **95%** | **54.599.049** | **PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM** | **Persentase Capaian Kinerja Penyelenggaran Pemerintahan Umum kecamatan ('%)** | **Kantor Kec. Malili** | **95%** | **54.599.049** |  |
| *1* | **Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah** | **Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah** | **Kantor Kec. Malili** | **95%** | **54.599.049** | **Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah** | **Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah** | **Kantor Kec. Malili** | **95%** | **54.599.049** |  |
| *2* | Pelakasanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan | Persentase rekomendasiforum koordinasi pimpinankecamatan yangditindaklanjuti | Kantor Kec. Malili | 100% | 54.599.049 | Pelakasanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan | Persentase rekomendasiforum koordinasi pimpinankecamatan yangditindaklanjuti | Kantor Kec. Malili | 100% | 54.599.049 |  |
| *VI* | **PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAH DESA** | **Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa yang dilaksanakan** | **Kantor Kec. Malili** | **100%** | **4.999.850** | **PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAH DESA** | **Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa yang dilaksanakan** | **Kantor Kec. Malili** | **100%** | **4.999.850** |  |
| *1* | **Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa** | **Persentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa** | **Kantor Kec. Malili** | **100%** | **4.999.850** | **Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa** | **Persentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa** | **Kantor Kec. Malili** | **100%** | **4.999.850** |  |
| *2* | Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan | Jumlah Kawasan Perdesaan yang terpantau perencanaan dan pelaksanaan programnya | Kantor Kec. Malili | 15 Desa/ Kelurahan | 4.999.850 | Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan | Jumlah Kawasan Perdesaan yang terpantau perencanaan dan pelaksanaan programnya | Kantor Kec. Malili | 15 Desa/ Kelurahan | 4.999.850 |  |
| **JUMLAH TOTAL** | **3.858.936.598** |  **JUMLAH TOTAL**  | **3.858.936.598** |   |  |

Dalam pengajuan jumlah Pagu Anggaran yang dituangkan dalam RKPD belum merupakan Pagu Final melainkan masih bersifat sementara atau indikatif, hal ini ditetapkan dan disetujui dan sangat tergantung akan kondisi keuangan daerah, sehingga SKPD harus benar-benar memprioritaskan program kegiatan untuk tahun 2022.

# Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Musrenbang merupakan salah satu tahapan perencanaan pembangunan yang harus dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Luwu Timur dan merupakan forum strategis yang melibatkan semua unsur pelaku pembangunan di Kabupaten Luwu Timur baik dari unsur pemerintah maupun unsur swasta dan tokoh masyarakat yang berkepentingan dalam pelaksanaan pembangunan di Kabupaten luwu Timur. Kegiatan dimulai dari pelaksanaan musrenbang tingkat Desa/Kelurahan, Musrenbang Kecamatan, Musrenbang Kabupaten dan diteruskan pada tingkat provinsi dan Nasional. Kecamatan Malili menjaring beberapa kegiatan yang diusulkan oleh masyarakat yang terdiri atas 14 (dua belas) Desa definitif dan 1 (satu) Kelurahan yang di akomodir menjadi satu dokumen prioritas usulan yang kemudian menjadi usulan kegiatan rencana pembangunan tahunan kecamatan Malili yang selanjutnya diteruskan ke Bappeda untuk menjadi bahan penyusunan prioritas pembangunan Daerah Kabupaten Luwu Timur. Telaah usulan program dan kegiatan masyarakat yang didasari oleh pemikiran bahwa dalam rangka mewujudkan visi Bupati dan Wakil Bupati Terpilih yaitu ***“Kabupaten Luwu Timur yang berkelanjutan dan lebih maju berlandaskan nilai agama dan budaya””***. Hal tersebut perlu dilaksanakan dan dicapai oleh pengemban delegasi.

Permasalahan yang kadang terjadi dari tahun ke tahun adalah perencanaan pembangunan daerah yang telah ditetapkan melalui RPJMD belum sepenuhnya tersosialisasi sampai ke tingkat Desa sehingga singkronisasi perencanaan dari tingkat Desa ke tingkat Kecamatan belum maksimal antara program yang tertuang di RPJMD dan kebutuhan pembangunan di tingkat Desa masih saja belum seiring apalagi dalam mekanisme perencanaan di padukan dengan hasil-hasil reses perorangan oleh para anggota DPRD yang notabene mengakomodir keinginan-keinginan dari masyarakat bukan mengacu ke kebutuhan yang sifatnya prioritas.

# BAB III

**TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN**

# Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

# Dalam rangka mendukung terwujudnya Indonesia yang sejahtera, demokratis dan berkeadilan, kebijakan pembangunan nasional di bidang aparatur diarahkan pada perbaikan tata kelola pemerintahan yang baik, dengan strategi sebagai berikut :

# Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

# Upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik akan terus dilakukan secara nyata, melalui beberapa langkah berikut :

* + - 1. Memperkuat manajemen dan sistem pelayanan publik nasional;
			2. Penerapan standar pelayanan minimal pelayanan publik
			3. Pengembangan sistem evaluasi kinerja pelayanan publik.
1. Peningkatan kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi

Upaya peningkatan kapasitas dan akuntabilitas kinerja pemerintah akan terus ditingkatkan melalui kebijakan berikut :

1. Penataan kelembagaan instansi pemerintah sejalan dengan prinsip structure ollow fuction;
2. Pengembangan sistem ketatalaksanaan untuk mendukung peningkatan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam proses kerja pemerintahan;
3. Peningkatan proesionalisme, netralitas dan kesejahteraan SDM Aparatur;
4. Peningkatan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.
5. Pemantapan pelaksanaan reformasi birokrasi

Dalam rangka pemantapan pelaksanaan reormasi birokrasi akan ditempuh langka-langka sebagai berikut :

1. Peningkatan koordinasi pelaksanaan reormasi birokrasi instansi
2. Pemberdayaan SDM aparatur untuk mendukung pelaksanaan reormasi
3. Perluasan reformasi birokrasi pada instansi pemerintahan pusat dan daerah.

# Tujuan dan Sasaran Renja Kecamatan Malili

#  Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi dan tujuan sebagai hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun, yang dirumuskan bersifat spesifik, realistis, dilengkapi dengan sasaran yang terukur dan dapat dicapai dalam periode yang direncanakan.

Untuk itu tujuan disusun guna memperjelas pencapaian sasaran yang ingin diraih. Tujuan dalam Renja ini diartikan sebagai pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi dan melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis dan permasalahan pelayanan SKPD. Rumusan tujuan diturunkan secara operasional dari masing-masing misi pembangunan daerah yang telah ditetapkan dengan memperhatikan visi. Visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang akan diwujudkan yaitu menjadikan ***“Kabupaten Luwu Timur yang berkelanjutan dan lebih maju berlandaskan nilai agama dan budaya””*** artinya melanjutkan pembangunan daerah menujuh kabupaten Luwu Timur yang lebih maju, sejahtera dan mandiri melalui penambahan ekonomi kerakyatan secara terpadu dan berkelanjutan yang berdasarkan nilai agama dan budaya. berdasarkan nilai agama dan budaya.

Untuk mencapai visi Kabupaten Luwu Timur tersebut, maka dirumuskan 6 misi pembangunan sebagai berikut :

* + - 1. *Meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat secara menyeluruh*
			2. *Mengembangkan perekonomian daerah yang berdaya saing dan berjaringan luas*
			3. *Menyediakan infrastruktur daerah yang memadai dan lingkungan yang berkualitas*
			4. ***Menciptakan kepemerintahan dan pelayanan publik yang lebih baik***
			5. *Mewujudkan ketentraman dan ketertiban bagi seluruh warga masyarakat*
			6. *Menjamin keberlangsungan pembangunan yang berbasis pada agama dan budaya*

Berdasarkan tugas dan fungsinya maka Kecamatan Malili merupakan bagian Organisasi Perangkat Daerah yang mendukung pelaksanaan misi yang ke-4 yaitu **“*Menciptakan kepemerintahan dan pelayanan publik yang lebih baik”***

Adapun tujuan dari misi tersebut ialah ***“Mewujudkan Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik di Kecamatan”***

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Sasaran dalam Renja ini diartikan sebagai hasil-hasil pembangunan yang hendak dicapai dalam mewujudkan tujuan pembangunan berdasarkan visi-misi. Sasaran dijabarkan dari setiap tujuan dimana sebuah tujuan dapat terjabarkan dalam lebih dari satu sasaran sesuai kompleksitas tujuan tersebut. Indikator kinerja sasaran ditetapkan pada level outcome dan target kinerja ditetapkan berdasarkan analisis capaian kinerja selama ini dan kapasitas fiskal dalam pembiayaan pembangunan untuk satu tahun kedepan.

Penetapan indikator sasaran Kantor Kecamatan Malili secara menyeluruh diharapkan dapat memberikan fokus dalam penentuan strategi dan prioritas. Sasaran pembangunan Kantor Kecamatan Malili Kabupaten Luwu Timur adalah :

1. Meningkatnya Mutu Pelayanan Publik dengan indikator Indeks Kepuasan Masyarakat
2. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja OPD Kantor Kecamatan Malili dengan indikator Nilai SAKIP

Secara lebih seksama, keterkaitan antara misi pembangunan jangka menengah Kantor Kecamatan Malili Kab.Luwu Timur periode tahun 2021-2026 dengan tujuan, sasaran dan indikator-indikator pembangunan yang digunakan dapat dilihat pada table dibawah ini.

Tabel.3.2

Tujuan dan Sasaran Renja

Kantor Kecamatan Malili Tahun 2022

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No | Tujuan | Indikator Tujuan | Sasaran | IndikatorSasaran | Target |
| 1 | Meningkatkan Kapasitas Pelayanan Publik dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kecamatan Malili | Persentase Peningkatan Nilai IKM | Meningkatnya Kemampuan Pelayanan Publik Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kecamatan Malili | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (Nilai) | 92,7 |
| 2 | Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Penyelenggaaan Pemerintahan Daerah Tingkat Kecamatan Malili | Nilai LAKIP Kecamatan Malili | Meningkatnya Capaian Kinerja dan Keuangan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kecamatan Malili | Persentase Capaian Kinerja Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten di Kecamatan ('%) | 65,5 |

# Program dan Kegiatan

Sebagai perwujudan dalam mendukung prioritas pembangunan Kabupaten Luwu Timur Tahun 2022, prioritas pembanguann daerah yang terkait dengan kegiatan operasional Kecamatan Malili adalah peningkatan kualitas perencanaan melalui peningkatan profesionalisme aparatur Kecamatan Malili dalam pembangunan dan peningkatan kualitas dokumen perencanaan yang dapat dilaksanakan sesuai kebutuhan dan kemampuan daerah. Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan rencana kerja Tahun 2020, pelaksanaan Kinerja kecamatan Malili Tahun 2022 ditunjang dengan belanja tidak langsung yang anggarannya diperuntukkan untuk belanja pegawai dan belanja langsung yang terdiri dari belanja langsung urusan wajib dan pilihan (program) dengan ruang lingkup kegiatannya.. Peningkatan kualitas dokumen perencanaan yang dapat dilaksanakan sesuai dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) Kantor Kecamatan Malili. Maka program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Kabupaten/Kota
	* + 1. Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
				1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
				2. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
				3. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD
				4. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
			2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
				1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
				2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD
			3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
				1. Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
			4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
				1. Pendataan dan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian
				2. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundangb-undangan
			5. Administrasi Umum Perangkat Daerah
				1. Penyediaan Kompenen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
				2. Penyediaan bahan logistik kantor
				3. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
				4. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
				5. Fasilitasi kunjungan tamu
				6. Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD
			6. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
				1. Pengadaan kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan
			7. Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah
				1. Penyediaan jasa surat menyurat
				2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
				3. Penyediaan jasa pelayanan umum kantor
			8. Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah
				1. Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak, dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan
				2. Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya
				3. Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya
2. Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik
	* + 1. Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masayarakat di Wilayah Kecamatan
3. Peningkatan efektifitas pelaksanaan pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan
	* + 1. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat
4. Pelaksanaan urusan pememrintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan
5. Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan
	* 1. Koordinasi kegiatan pemberdayaan desa
6. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa
	* 1. Kegiatan pemberdayaan kelurahan
7. Pemberdayaan Masyarakat di Keluarahan
8. Program koordinasi ketentraman dan ketertiban umum
9. Koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum
10. Sinergitas dengan kepolisian Negara republik Indonesia, Tentara Nasional

Indonesia dan Instansi vertikal di wilayah kecamatan

1. Harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat
2. Koordinasi penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah
3. Koordinasi/sinergi dengan perangkat daerah yang tugas dan dan fungsinya di bidang penegakan Peraturan perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia
4. Program Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum
5. Penyelenggaraan Urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah
6. Pelaksanaan tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan
7. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa
8. Fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintah desa
9. Koordinasi pelaksanaan pembangunan kawasan pedesaan di wilayah kecamatan

**Tabel 3.3**

**RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN KANTOR KECAMATAN MALILI TAHUN 2022**

 **DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2023**

**KABUPATEN LUWU TIMUR**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **KODE** | **Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan** | **Lokasi Detail** | **Indikator Kinerja Program /Kegiatan** | **Rencana Tahun 2022 (N)** | **Catatan Penting** | **Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 (N+1)** |
| **Target Capaian Kinerja** | **Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif** | **Sumber Dana** | **Target Capaian Kinerja** | **Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif** |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* |
|  | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **KANTOR KECAMATAN MALILI** | **Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar ('%)** |  | **3.557.892.848** | **APBD** |  |  | **3.792.219.757** |
|  | **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | **KANTOR KECAMATAN MALILI** | Persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran & evaluasi tepat waktu ('%) |  | **18.385.460** |  |  |  | **84.942.214** |
|  | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | KANTOR KECAMATAN MALILI | Jumlah dokumen Perencanaan Yang disusun Tepat Waktu (Dokumen) | 3 dokumen | 5.000.000 |  |  | 2 dokumen | 54.544.859 |
|  | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | KANTOR KECAMATAN MALILI | Jumlah dokumen RKA- SKPD yang disusun Tepat Waktu (Dokumen) | 2 dokumen | 4.999.880 | **APBD** |  | 2 dokumen | 15.397.355 |
|  | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD | KANTOR KECAMATAN MALILI | Jumlah dokumen DPA- SKPD yang disusun Tepat Waktu (Dokumen) | 2 dokumen | 4.999.800 |  |  | 2 dokumen | 5.000.000 |
|  | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | KANTOR KECAMATAN MALILI | Jumlah dokumen evaluasi kinerja pelayanan perangkat daerah yang disusun (Dokumen) | 10 dokumen | 3.385.780 |  |  | 10 dokumen | 10.000.000 |
|  | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | **KANTOR KECAMATAN MALILI** |  |  | **2.181.955.476** | **APBD** |  |  | **2.274.457.166** |
|  | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | KANTOR KECAMATAN MALILI | Jumlah ASN yang gaji dan tunjangan terbayarkan (Orang) | 21 orang | 2.154.370.786 |  |  | **24 Orang** | 2.215.160.786 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | KANTOR KECAMATAN MALILI |  | 18 dokumen | 27.584.690 |  |  | 18 dokumen | 59.296.380 |
|  | **Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah** | **KANTOR KECAMATAN MALILI** |  |  | **13.949.920** | **APBD** |  |  | **13.949.920** |
|  | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | KANTOR KECAMATAN MALILI | Jumlah Dokumen Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD yang disusun | 2 dokumen | 13.949.920 |  |  | 4 dokumen | **13.949.920** |
|  | **Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah** | **KANTOR KECAMATAN MALILI** |  |  | **30.298.269** | **APBD** |  |  | **93.480.069** |
|  | Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | KANTOR KECAMATAN MALILI | Persentase Rara-rata Capaian kinerja Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah ('%) | 100% | 10.998.269 |  |  | 12 Laporan | 48.300.000 |
|  | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | KANTOR KECAMATAN MALILI | Jumlah ASN yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang - undangan (Orang) | 10 orang | 19.300.000 |  |  | 10 orang | 45.180.000 |
|  | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | **KANTOR KECAMATAN MALILI** | **Persentase Rata- Rata Capaian Kinerja administrasi umum PD ('%)** | **100%** | **499.013.500** | **APBD** |  | **100%** | **550.618.200** |
|  | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | KANTOR KECAMATAN MALILI | Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang di sediakan (jenis) | 15 jenis | 6.604.300 |  |  | 20 jenis | 6.604.300 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | KANTOR KECAMATAN MALILI | Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan (jenis) | 15 Jenis | 63.618.100 |  |  | 2 Jenis | 59.304.000 |
|  | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | KANTOR KECAMATAN MALILI | Jumlah Barang cetakan dan/atau penggandaan yang disediakan (jenis) | 2000 exm | 5.786.400 |  |  |  75.000 lembar | 45.089.900 |
|  | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan | KANTOR KECAMATAN MALILI | Jumlah Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang- undangan (eksamplar) | 8 jenis | 9.900.000 |  |  | 20 exm | 9.900.900 |
|  | Fasilitasi Kunjungan Tamu | KANTOR KECAMATAN MALILI | Jumlah tamu yang difasilitasi (Orang) | 3.540 kotak | 124.030.000 |  |  | 7.417 kotak | 123.580.000 |
|  | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | KANTOR KECAMATAN MALILI | Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi SKPD yang diikuti (kali) | 350 kali | 289.074.700 |  |  | 438 kali | 306.140.000 |
|  | **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | **KANTOR KECAMATAN MALILI** | **Persentase BMD-PD penunjang yang terpenuhi (%)** |  | **275.000.000** | **APBD** |  |  | **160.000.000** |
|  | Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | KANTOR KECAMATAN MALILI | Jumlah kendaraan dinas yang diadakan | 1 unit | 275.000.000 |  |  | 1 unit | 25.000.000 |
|  | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **KANTOR KECAMATAN MALILI** | **Persentase Rata-Rata Capaian Kiner jasa penunjang urusan pemerintahan daerah ('%)** |  | **463.425.223** | **APBD** |  |  | **437.112.723** |
|  | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | KANTOR KECAMATAN MALILI | Jumlah surat masuk dan keluar yang diadministrasikan (Surat) | 850 surat | 19.245.223 |  |  | 1200 surat | 19.098.223 |
|  | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | KANTOR KECAMATAN MALILI | Jumlah rekening telepon, listrik dan air yang terbayarkan (Rekening) | 36 rekening | 113.880.000 |  |  | 36 rekening | 121.680.000 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | KANTOR KECAMATAN MALILI | pelayanan umum kantor yang dibayarkan (Orang) | 37 orang | 330.300.000 |  |  | 37 orang | 279.000.000 |
|  | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **KANTOR KECAMATAN MALILI** | **Persentase Barang Milik Daerah penunjang urusan pemerintahan yang terpelihara dengan baik ('%)** |  | **75.865.000** | **APBD** |  |  | **125.915.000** |
|  | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | KANTOR KECAMATAN MALILI | Jumlah kendaraan perorangan dinas atau jabatan yang dipelihara (unit) | 4 unit | 2.565.000 |  |  | 8 unit | 32.615.000 |
|  | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | KANTOR KECAMATAN MALILI | Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara (Unit) | 17 unit | 17.800.000 |  |  | 17 unit | 17.800.000 |
|  | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | KANTOR KECAMATAN MALILI | Jumlah gedung kantor dan/atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi (Unit) | 5 unit | 55.500.000 |  |  | 5 unit | 75.500.000 |
|  | **PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK** | **KANTOR KECAMATAN MALILI** | **Persentase capaian kinerja peningkatan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik ('%)** |  | **87.664.860** | **APBD** |  |  | **89.691.000** |
|  | **Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah di kecamatan** | **KANTOR KECAMATAN MALILI** | **Peresentase urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah di kecamatan (%)** | **100%** | **49.991.660** |  |  | **100%** | **53.399.660** |
|  | Peningkatan Efektifitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan | KANTOR KECAMATAN MALILI | **Presentase efektifitas pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (%)** | **100%** | **49.991.660** |  |  | **100%** | **53.399.660** |
|  | **Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat** | **KANTOR KECAMATAN MALILI** | **Persentase urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat yang dilaksanakan ('%)** | **100%** | **37.673.200** | **APBD** |  | **100%** | **89.691.000** |
|  | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan | KANTOR KECAMATAN MALILI | Jumlah Ijin Mendirikan Bangunan yang diterbitkan (Lembar) | 200 lembar | 37.673.200 |  |  | 400 lembar | 89.691.000 |
|  | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN** | **KANTOR KECAMATAN MALILI** | **Persentase Capaian Kinerja Pemberdayaan masyarakat Desa dan Kelurahan ('%)** |  | **140.780.720** | **APBD** |  |  | **88.901.350** |
|  | **Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa** | **KANTOR KECAMATAN MALILI** | **Persentase koordinasi kegiatan pemberdayaan desa yang dilaksanakan ('%)** | **100%** | **24.999.680** | **APBD** |  | **100%** | **88.901.350** |
|  | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa | KANTOR KECAMATAN MALILI | Jumlah Partisipasi Masyarakat Pada pelaksanaan Musrenbang Kecamatan (Orang) | 100% | 24.999.680 |  |  | 100% | 35.501.690 |
|  | **Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan** | **KANTOR KECAMATAN MALILI** | **Persentase Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan ('%)** |  | **115.781.040** | **APBD** |  |  | **319.015.120** |
|  | Pemberdayaan Masyarakat di kelurahan | KANTOR KECAMATAN MALILI | Presentase Kegiatan kelurahan yang memberdayakan masyarakat (%) | 100% | 115.781.040 |  |  | 100% | 131.115.120 |
|  | **PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM** | **KANTOR KECAMATAN MALILI** |  |  | **12.999.271** | **APBD** |  |  | **25.000.000** |
|  | **Koordinasi upaya Penyelenggaraan Keutentraman dan Ketertiban Umum** | **KANTOR KECAMATAN MALILI** |  |  | **7.999.480** | **APBD** |  |  | **25.000.000** |
|  | Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia, dan Instansi vertikal di wilayah kecamatan | KANTOR KECAMATAN MALILI | Persentase upaya penyelesaian kasus penyelenggaraan kasus pelanggaran keamanan dan ketertiban serta persialan social yang difasilitasi | 95% | 4.999.765 |  |  | 100% | 10.000.000 |
|  | Harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat | KANTOR KECAMATAN MALILI | Jumlah rapat dalam upaya himbauan atau pencegahan pelanggaran ketentraman dan ketertiban yang dilaksanakan | 2 kegiatan | 2.999.715 |  |  | 12 kali | 15.000.000 |
|  | **Koordinasi penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah** | **KANTOR KECAMATAN MALILI** |  |  | **4.999.791** | **APBD** |  |  | **25.000.000** |
|  | Koordinasi/sinergi dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau kepolisian negara nrepublik indonesia | KANTOR KECAMATAN MALILI | Jumlah koordinasi/sinergitas dengan Polri dan/atau perangkat daerah bidang penegakan peraturan perundang-undangan yang dilaksanakan | 12 kali | 4.999.791 |  |  | 12 kali | 25.000.000 |
|  | **PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM** | **KANTOR KECAMATAN MALILI** | **Persentase Capaian Kinerja Penyelenggaran Pemerintahan Umum kecamatan ('%)** |  | **54.599.049** | **APBD** |  |  | **55.066.149** |
|  | **Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah** | **KANTOR KECAMATAN MALILI** | **Persentase rekomendasi Forum koordinasi pimpinan kecamatan yang ditindaklanjuti ('%)** |  | **54.599.049** | **APBD** |  |  | **55.066.149** |
|  | Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan | KANTOR KECAMATAN MALILI | Persentase rekomendasi Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan yang ditindaklanjuti ('%) |  | 54.599.049 |  |  |  | 55.066.149 |
|  | **PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA** | **KANTOR KECAMATAN MALILI** | **Persentase penyelengaraan pemerintahan desa yang berjalan sesuai standar dan ketentuan perundangan yang berlaku ('%)** |  | **4.999.850** | **APBD** |  |  | **7.000.000** |
|  | **Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa** | **KANTOR KECAMATAN MALILI** | **Persentase fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan Pemerinthan Desa yang dilaksanakan ('%)** |  | **4.999.850** | **APBD** |  |  | **7.000.000** |
|  | Koordinasi PelaksanaanPembangunan KawasanPerdesaan di WilayahKecamatan | KANTOR KECAMATAN MALILI | Jumlah Kawasan Perdesaanyang TerpantauPerencanaan danPelaksanaan Programnya | 15 Desa/Kelurahan | 4.999.850 |  |  | 15 Desa/Kelurahan | **7.000.000** |
| **T O T A L** | **3.583.936.598** |  |  |  | **4.057.878.256** |

# BAB IV

**RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

Pada Tahun 2022 Kantor Kecamatan Malili merencanakan 5 program dan 14 kegiatan dengan pagu indikatif Rp. 3.858.936,- yang terdiri dari Belanja Tidak Langsung Rp 2.189.950,- dan Belanja Langsung Rp 1.668.985.812,-. Alokasi Program dan kegiatan serta indikasi pendanaan Rencana Kerja Tahun 2022 Kantor Kecamatan Malili Kabupaten Luwu Timur dapat dilihat pada tabel berikut ini:

# Tabel.7

**RENCANA KERJA DAN PENDANAAN KANTOR KEC.MALILI KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2022**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **No.** | **Program/Kegiatan** | **Rencana Tahun 2022** | **Sumber Dana** |
| **Indikator Kinerja** | **Lokasi** | **Target Capaian Kinerja** | **Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif** |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* |
|  | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar ('%)** | Kantor Kec. Malili |  | **3.282.936** | **APBD** |
|  | **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | Persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran & evaluasi tepat waktu ('%) | Kantor Kec. Malili |  | **18.385.460** |  |
|  | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah dokumen Perencanaan Yang disusun Tepat Waktu (Dokumen) | Kantor Kec. Malili | 3 dokumen | 5.000.000 |  |
|  | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Jumlah dokumen RKA- SKPD yang disusun Tepat Waktu (Dokumen) | Kantor Kec. Malili | 2 dokumen | 4.999.880 | **APBD** |
|  | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DKA-SKPD | Jumlah dokumen DPA- SKPD yang disusun Tepat Waktu (Dokumen) | Kantor Kec. Malili | 2 dokumen | 4.999.800 |  |
|  | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah dokumen evaluasi kinerja pelayanan perangkat daerah yang disusun (Dokumen) | Kantor Kec. Malili | 10 dokumen | 3.385.780 |  |
|  | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** |  | Kantor Kec. Malili |  | **2.181.955.476** | **APBD** |
|  | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah ASN yang gaji dan tunjangan terbayarkan (Orang) | Kantor Kec. Malili | 21 orang | 2.154.370.786 |  |
|  | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD |  | Kantor Kec. Malili | 18 dokumen | 27..584.690 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah** |  | Kantor Kec. Malili |  | **13.949.920** | **APBD** |
|  | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | Persentase BMD yang Diadministrasikan sesuai standar ('%) | Kantor Kec. Malili | 2 dokumen | 13.949.920 |  |
|  | **Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah** |  | Kantor Kec. Malili |  | **30.298.269** | **APBD** |
|  | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | Jumlah ASN yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang - undangan (Orang) | Kantor Kec. Malili | 10 Orang | 19.300.000 |  |
|  | Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | Persentase Rara-rata Capaian kinerja Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah ('%) | Kantor Kec. Malili | 4 Dokumen | 10.998.269 |  |
|  | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | **Persentase Rata- Rata Capaian Kinerja administrasi umum PD ('%)** | Kantor Kec. Malili |  | **499.013.500** | **APBD** |
|  | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang di sediakan (jenis) | Kantor Kec. Malili | 15 jenis | 6.604.300 |  |
|  | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan (jenis) | Kantor Kec. Malili | 15 jenis | 63.618.100 |  |
|  | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Barang cetakan dan/atau penggandaan yang disediakan (jenis) | Kantor Kec. Malili | 2000lembar | 5.786.400 |  |
|  | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan | Jumlah Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang- undangan (eksamplar) | Kantor Kec. Malili | 8 Exampler | 9.900.000 |  |
|  | Fasilitasi Kunjungan Tamu | Jumlah tamu yang difasilitasi (Orang) | Kantor Kec. Malili | 3.540 kotak | 124.030.000 |  |
|  | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi SKPD yang diikuti (kali) | Kantor Kec. Malili | 350 kali | 289.074.700 |  |
|  | **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | **Persentase BMD-PD penunjang yang terpenuhi (%)** | Kantor Kec. Malili |  | **275.000.000** | **APBD** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah kendaraan dinas yang diadakan | Kantor Kec. Malili | 1 unit | 275.000.000 |  |
|  | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **Persentase Rata-Rata Capaian Kiner jasa penunjang urusan pemerintahan daerah ('%)** | Kantor Kec. Malili |  | **463.425.223** | **APBD** |
|  | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah surat masuk dan keluar yang diadministrasikan (Surat) | Kantor Kec. Malili | 850 surat | 19.245.000 |  |
|  | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah rekening telepon, listrik dan air yang terbayarkan (Rekening) | Kantor Kec. Malili | 36 rekening | 113.880.000 |  |
|  | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | pelayanan umum kantor yang dibayarkan (Orang) | Kantor Kec. Malili | 37 orang | 75.865.000 |  |
|  | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **Persentase Barang Milik Daerah penunjang urusan pemerintahan yang terpelihara dengan baik ('%)** | Kantor Kec. Malili |  | **75.865.000** | **APBD** |
|  | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah kendaraan perorangan dinas atau jabatan yang dipelihara (unit) | Kantor Kec. Malili | 4 unit | 2.565.000 |  |
|  | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara (Unit) | Kantor Kec. Malili | 17 unit | 17.800.000 |  |
|  | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah gedung kantor dan/atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi (Unit) | Kantor Kec. Malili | 5 unit | 55.500.000 |  |
|  | **PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK** | **Persentase capaian kinerja peningkatan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik ('%)** | Kantor Kec. Malili |  | **87.664.860** | **APBD** |
|  | **Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat** | **Persentase urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat yang dilaksanakan ('%)** | Kantor Kec. Malili |  | **47.673.200** | **APBD** |
|  | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan | Jumlah Ijin Mendirikan Bangunan yang diterbitkan (Lembar) | Kantor Kec. Malili | 200 lembar | 37.673.200 |  |
|  | **Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kecamatan** | **Presentase Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kecamatan(%)** | **Kantor Kec. Malili** |  | **49,991.660** |  |
|  | Peningkatan efektifitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan | Presentase efektifitas pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan(%) | Kantor Kec. Malili | 100% | 49.991.660 |  |
|  | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN** | **Persentase Capaian Kinerja Pemberdayaan masyarakat Desa dan Kelurahan ('%)** | Kantor Kec. Malili |  | **140.780.720** | **APBD** |
|  | **Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa** | **Persentase koordinasi kegiatan pemberdayaan desa yang dilaksanakan ('%)** | Kantor Kec. Malili |  | **24.999.680** | **APBD** |
|  | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa | Jumlah Partisipasi Masyarakat Pada pelaksanaan Musrenbang Kecamatan (Orang) | Kantor Kec. Malili | 100% | 24.999.680 |  |
|  | **Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan** | **Persentase Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan ('%)** | Kantor Kec. Malili |  | **115.781.040** | **APBD** |
|  | Pemberdayaan Masyarakat di kelurahan | Presentase sarana dan prasarana yang dilaksanakan | Kantor Kec. Malili | 100% | 115.781.040 |  |
|  | **PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM** |  | Kantor Kec. Malili |  | **12.999.271** | **APBD** |
|  | **Koordinasi upaya Penyelenggaraan Keutentraman dan Ketertiban Umum** |  | Kantor Kec. Malili |  | **7.999.480** | **APBD** |
|  | Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia, dan Instansi vertikal di wilayah kecamatan | Persentase upaya penyelesaian kasus penyelenggaraan kasus pelanggaran keamanan dan ketertiban serta persialan social yang difasilitasi | Kantor Kec. Malili | 100% | 4.999.765 |  |
|  | Harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat | Jumlah rapat dalam upaya himbauan atau pencegahan pelanggaran ketentraman dan ketertiban yang dilaksanakan | Kantor Kec. Malili | 12 kali | 2.999.715 |  |
|  | **Koordinasi penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah** |  | Kantor Kec. Malili |  | **4.999.791** | **APBD** |
|  | Koordinasi/sinergi dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau kepolisian negara nrepublik indonesia | Jumlah koordinasi/sinergitas dengan Polri dan/atau perangkat daerah bidang penegakan peraturan perundang-undangan yang dilaksanakan | Kantor Kec. Malili | 12 kali | 4.999.791 |  |
|  | **PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM** | **Persentase Capaian Kinerja Penyelenggaran Pemerintahan Umum kecamatan ('%)** | Kantor Kec. Malili |  | **54.599.049** | **APBD** |
|  | **Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah** | **Persentase rekomendasi Forum koordinasi pimpinan kecamatan yang ditindaklanjuti ('%)** | Kantor Kec. Malili |  | **54.599.049** | **APBD** |
|  | Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan | Persentase rekomendasi Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan yang ditindaklanjuti ('%) | Kantor Kec. Malili | 100 % | 54.599.049 |  |
|  | **PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA** | **Persentase penyelengaraan pemerintahan desa yang berjalan sesuai standar dan ketentuan perundangan yang berlaku ('%)** | Kantor Kec. Malili |  | **4.999.850** | **APBD** |
|  | **Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa** | **Persentase fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan Pemerinthan Desa yang dilaksanakan ('%)** | Kantor Kec. Malili |  | **4.999.850** | **APBD** |
|  | Koordinasi PelaksanaanPembangunan KawasanPerdesaan di WilayahKecamatan | Jumlah Kawasan Perdesaanyang TerpantauPerencanaan danPelaksanaan Programnya | Kantor Kec. Malili | 15 Desa/Kelurahan | 4.999.850 |  |
| **JUMLAH TOTAL** | **3.858.936.598** |  |

# BAB V

**P E N U T U P**

Rencana Kerja Kecamatan Malili tahun 2022 merupakan pedoman dalam melakukan kegiatan Kecamatan Malili Tahun 2022, dengan mengintegrasikan dukungan perencanaan dan penganggaran yang dimiliki oleh Kecamatan Malili, Penyusunan rencana kegiatan ini diharapkan mampu mengantisipasi sekaligus menjawab tuntutan perkembangan issu-issu strategis khususnya di Kecamatan Malili. Rencana Kerja (Renja) Kantor Kecamatan Malili Kabupaten Luwu Timur ini diharapkan dapat digunakan sebagai acuan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian program dan kegiatan pada Kantor Kecamatan Malili dalam kurun waktu tahun 2022, sehingga upaya Kantor Kecamatan Malili dapat lebih terarah dan terukur. Untuk itu diperlukan partisipasi, semangat, dan komitmen yang kuat dari seluruh aparatur Kantor Kecamatan Malili, karena akan menentukan keberhasilan program dan kegiatan yang telah disusun. Dengan demikian Rencana Kerja ini nantinya bukan hanya sebagai dokumen administrasi saja, karena secara substansial merupakan pencerminan tuntutan pembangunan yang memang dibutuhkan oleh *stakeholders* sesuai dengan visi dan misi daerah yang ingin dicapai.

 Demikian Renja Kecamatan Malili Tahun 2022 disusun agar dipakai sebagai pedoman penetapan kebijakan, program dan strategi yang dilakukan pada tahun berikutnya. Kami menyadari bahwa penyusunan Renja ini masih jauh dari kesempurnaan, untuk itu kritikan dan saran sangat diharapkan untuk perbaikan, dan atasnya diucapkan terima kasih.

 Malili, 6 April 2021

 **Camat,**

 **NUR SYAIFULLAH RAHMAN,S.STP**

 NIP : 19851126 200412 1 001